

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN



LKJIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini juga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pelaksanaan laporan kinerja selanjutnya diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun anggaran 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk mencapai target kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan pada ujungnya dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dan pihak lain guna perbaikan di masa yang akan datang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban



ABDUL RAHMAT, S.T., M.T.
Kabina Tk. I
NIP. 197211229 200212 1 003

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	3
1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	18
1.4 Landasan Hukum	23
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 Rencana Strategis	27
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	43
BAB IV – PENUTUP	172
4.1 Kesimpulan	172
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Data Dukung Capaian Kinerja	
3. SK Pengumpulan Data Kinerja	
4. SOP Penyusunan LKjIP	
5. Notulen Rapat Penyusunan LKjIP	
6. Berita Acara Capaian Kinerja	

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai Sesuai Bidang Tugas	12
1.2	Kondisi PNS/PPPK Menurut Pendidikan Formal	13
1.3	Kondisi Non PNS/ASN Menurut Pendidikan Formal	13
1.4	Kondisi Pegawai menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian ..	14
1.5	Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2024	15
2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
2.2	Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025	37
2.3	Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	41
3.1	Capaian Kinerja Sasaran	47
3.2	Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya	68
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah ..	105
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Organisasi Lain	107
3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	109
3.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	116
3.7	Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	154
3.8	Realisasai Anggaran	157

DAFTAR GAMBAR

1.1	Susunan Organisasi	5
-----	--------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah adalah elemen dasar yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. "*If you fail to plan, you are planning to fail,*" adalah sebuah *quote* terkenal dari bapak pendiri Amerika Serikat, Benjamin Franklin yang pada intinya menyatakan jika kita gagal dalam merencanakan pada dasarnya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. *Quote* tersebut menggambarkan betapa pentingnya sebuah proses perencanaan, perencanaan yang berkualitas akan memperbesar ketercapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut George R. Terry, 1958 dalam *Principles of Management* fungsi dasar manajemen terdiri dari empat hal yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Hal ini memperkuat posisi sentral perencanaan dalam fungsi manajemen, perencanaan (*planning*) merupakan wujud dari arah tujuan dan sasaran sebuah organisasi dibentuk.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, perencanaan merupakan bagian dari penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah sebagai pemenuhan janji-janji politik yang telah disampaikan kepada Masyarakat dalam gelaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Perencanaan disusun dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini didasarkan pada isu-isu strategis daerah dan upaya penyelesaiannya dengan penetapan *critical success factors* atau faktor-faktor utama yang harus dicapai untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sebuah perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja tidak hanya berfokus pada *output* atau *outcome* saja namun juga harus mempunyai dampak (*impact*) yang nyata.

Guna pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta memiliki dampak (*impact*) yang nyata dalam penyelesaian isu strategis

dearah, maka akuntabilitas perencanaan wajib diwujudkan. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 4 (empat) komponen penilaian akuntabilitas kinerja yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai *leading sector* yang menangani urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan bertanggung jawab dalam mewujudkan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah. Kualitas perencanaan pembangunan dapat dicapai apabila seluruh target kinerja tujuan dan sasaran daerah dapat dicapai dengan baik. Kualitas inovasi daerah dapat dicapai apabila terdapat peningkatan Indeks Inovasi Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban berupaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penumbuhan dan pemanfaat inovasi daerah baik yang berasal dari perangkat daerah maupun dari Masyarakat. Inovasi daerah tidak hanya bertumpu pada penumbuhan jumlah inovasi saja namun juga peningkatan kualitas dan kematangan inovasi sehingga dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, daerah berwenang dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun guna mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di Tahun 2025. Laporan ini bagian dari pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah dalam mengampu tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah. Dengan laporan kinerja yang akuntabel diharapkan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja dapat dicapai, serta sebagai bagian dari wujud komitmen organisasi dalam upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Hal ini menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dimana daerah berwenang dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dituangkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dengan tipe perangkat daerah yaitu Tipe A.

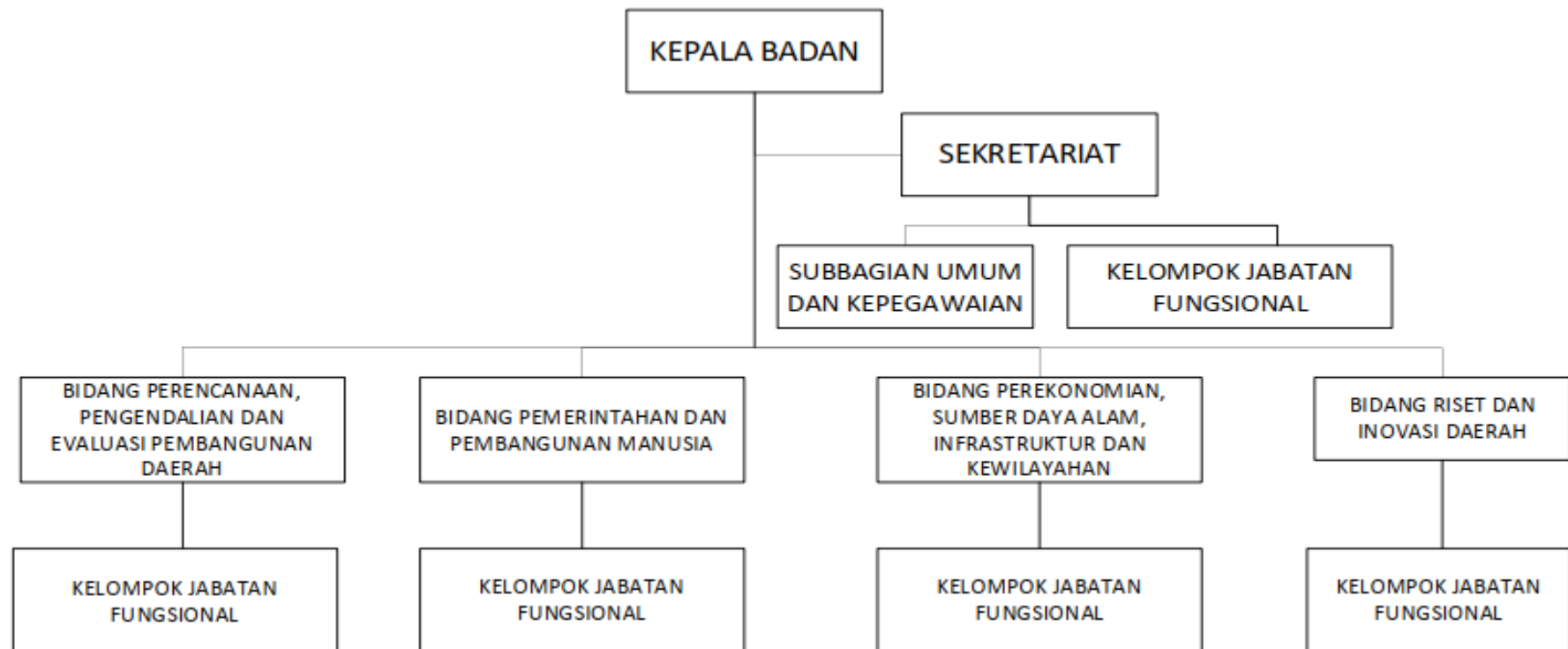
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Pembangunan, riset, dan inovasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Pembangunan, riset, dan inovasi;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan Pembangunan, riset, dan inovasi;
- e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.
 SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN TUBAN



Rincian tugas dan fungsi sekretariat/bidang dalam susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan fungsi sebagai berikut :

"

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan pendanaan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- g. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

"

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan pengawasan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengawasan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan pembangunan manusia;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pembinaan ekonomi;
- f. pelaksanaan pengawasan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;

"

- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang bertugas untuk membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, pendampingan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pembinaan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan di Daerah;
- c. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;

- f. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- g. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang bangun/model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- i. pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- k. koordinasi dan fasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual dan indikasi geografis;
- l. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah;
- m. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- n. pelayanan administrasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sumber daya yang dimiliki di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi : sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/modal). Secara rinci sumber daya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perencanaan, Urusan penelitian dan pengembangan adalah berjumlah 71 (Tujuh Puluh Satu) pada tahun 2025. Adapun komposisinya adalah PNS sebanyak 34

Personil, PPPK sebanyak 36 Personil dan Non ASN sebanyak 1 Personil. Selengkapnya dapat digambarkan sesuai tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025
sesuai Bidang Tugas

No	Bidang Tugas	Eselon						JF / Staf		PPPK		Non		Jumlah	
		II		III		IV		Pelaksana				PNS/ASN			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	7	8	11	12
1	Kepala	1												1	0
2	Sekretariat			1			1	1	5	4	3	1		7	9
3	Bidang Riset dan Inovasi Daerah			1				2	2	1	4			4	6
4	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan				1			1	4	6	3			7	8
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1			3	2	3	5			6	8
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1			4	3	3	4			7	8
Jumlah		1	0	2	3	0	1	11	16	17	19	1	0	32	39
		1		5		1		27		36		1		71	

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

Dari total 70 personil Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dikelompokkan dalam latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Kondisi PNS/PPPK Menurut Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SLTA	2	1	3
2	D-III/D-IV	2	4	6
3	S-1	23	28	51
4	S-2	4	6	10
5	S-3			
	Jumlah	31	39	70

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

Sedangkan 1 Orang aparatur Non-ASN memiliki latar belakang pendidikan formal sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kondisi Non PNS/ASN Menurut Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SLTA	1	-	1
	Jumlah	1	0	1

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

Sesuai jenjang kepangkatan dan golongan aparatur ASN Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah kondisi pegawainya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Kondisi Pegawai menurut Golongan / Ruang Pangkat Kepegawaian

No	Golongan	Kondisi Pegawai								Jumlah	
		a		b		c		d			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Golongan IV	2	1	2						4	1
2	Golongan III	3	3	1	2	1	1	4	10	9	16
3	Golongan II					1	1		2	1	3
4	Golongan I										
JUMLAH		5	4	3	2	2	2	4	12	14	20
		9		5		4		16		34	

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

b. Sarana dan Prasarana.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban menempati gedung perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. Jumlah ruang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari 7 ruang kerja, 4 ruang rapat, 1 gudang, 5 kamar mandi, 1 ruang lobby, dan 1 mushola. Luasan gedung yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban seluruhnya seluas $\pm$ 946 m². Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.

Selain bangunan gedung tersebut, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban, didukung pula dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
I.	Alat Angkutan		
	- Station Wagon	3	
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	3	
	- Sepeda Motor	31	
II.	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	- Global Positioning System (GPS)	13	
	- Laser Ace	4	
III.	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Mesin Ketik Manual Standard	7	
	- Lemari Besi/Metal	4	
	- Lemari Kayu	7	
	- Rak Besi	5	
	- Rak Kayu	21	
	- Filing Cabinet Besi	44	
	- Brandkas	1	
	- Peta	7	
	- Mesin Absensi	3	
	- LCD Projector/Infocus	3	
	- Papan Tulis	2	
	- Kursi Kayu	5	
	- Meja Rapat	18	
	- Meja Telepon	1	
	- Meja Resepsionis	2	
	- Meja 1/2 Biro	65	
	- Kursi Rapat	154	
	- Kursi Tamu	3	
	- Kursi Putar	11	
	- Kursi Biasa	36	
	- Meja Komputer	12	

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
	- Sofa	4	
	- Jam Elektronik	5	
	- Mesin Penghisap Debu/ <i>Vacuum Cleaner</i>	1	
	- Mesin Pemotong Rumput	1	
	- Lemari Es	1	
	- <i>A.C. Window</i>	33	
	- Kipas Angin	1	
	- Televisi	5	
	- <i>Sound System</i>	1	
	- <i>Wireless</i>	3	
	- <i>Unit Power Supply</i>	2	
	- <i>Stabilisator</i>	1	
	- Kamera Video	5	
	- Lambang Garuda Pancasila	1	
	- <i>Dispenser</i>	5	
	- <i>Handy Cam</i>	2	
	- <i>Gordyin/ Kray</i>	1	
	- Alat Pembantu Kebakaran	2	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	60	
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	5	
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	
	- Buffet Kayu	4	
IV.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
	- <i>Microphone/ Wireless MIC</i>	2	
	- <i>Power Supply Microphone</i>	1	
	- <i>Professional Sound System</i>	4	
	- <i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	1	

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	- <i>Video Monitor</i>	1	
	- <i>Tripod Camera</i>	1	
	- <i>Layar Film/ Projector</i>	1	
	- <i>Kamera Digital</i>	1	
	- <i>Video Conference</i>	1	
	- <i>Camera Conference</i>	1	
	- <i>Facsimile</i>	1	
V.	Alat Persenjataan		
	- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	
	- DVR CCTV	1	
	- Kamera Digital	1	
VI.	Komputer		
	- P.C Unit	31	
	- Lap Top	27	
	- <i>Note Book</i>	15	
	- <i>Hard Disk</i>	4	
	- <i>Scanner</i> (Peralatan Mini Komputer)	5	
	- <i>Computer Compatible</i>	5	
	- Monitor	1	
	- <i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	34	
	- <i>Server</i>	1	
	- <i>Router</i>	7	
VII.	Alat Keselamatan Kerja		
	- <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV)	3	
VIII.	Bangunan Gedung		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Gedung Tiga Lantai
	- Gedung Garasi Lain - Lain	1	Tempat Parkir

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- 1) politik;
- 2) teknokratik;
- 3) partisipatif;
- 4) atas-bawah (*top-down*); dan
- 5) bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepada daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

"

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah.

Pendekatan *Top Down-Bottom Up* dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “di atas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah” juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas” yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- 1) Penyusunan rencana;

Dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan dimulai dari penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Selanjutnya masing-masing

perangkat daerah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Kemudian melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan serta penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2) Penetapan rencana;

Penetapan rencana pembangunan menjadi produk hukum dilaksanakan setelah dilakukan penyusunan rancangan akhir yang telah disepakati sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3) Pengendalian pelaksanaan rencana;

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk

melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Mekanisme kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang dijabarkan menjadi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun tahapan penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan Evaluasi dan Analisa Keadaan

Hal-hal yang perlu dievaluasi dan dianalisa adalah sampai sejauh mana arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat/belum dicapai, berapa besar biaya yang telah dikeluarkan, dan sejauh mana tingkat penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan analisa Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah di kerjakan pada tahap pertama disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai kerangka makro yang akan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Tujuan dan arah pembangunan Daerah;
- b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;
- c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
- d. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

3. Melaksanakan Perumusan Usulan Program dan Kegiatan

Untuk menampung aspirasi masyarakat ditempuh sistem perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dalam menyusun/mengajukan rencana usulan program/ kegiatan, mengingat usulan program/kegiatan yang diusulkan mencakup berbagai aspek pembangunan dan berbagai sumber pembiayaan maka usulan tersebut perlu dikoordinasikan dan dibahas melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Propinsi, Musrenbang Tingkat Pusat dan Nasional.

4. Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun serta menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil.

Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam urusan perencanaan pembangunan daerah serta urusan penelitian dan pengembangan tahun 2025 di Kabupaten Tuban dapat diidentifikasi beberapa isu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan kualitas inovasi, kolaborasi antar stakeholder dan penguatan ekosistem inovasi daerah;
3. Peningkatan pemanfaatan dan penerapan hasil riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam mendukung kebijakan berbasis bukti untuk mengatasi permasalahan daerah, optimalisasi potensi dan peningkatan daya saing daerah.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri E Nomor 67);
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 4);dan
32. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tuban yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban diwujudkan dalam bentuk kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.

2.1.1. Rencana Strategis 2021-2026

Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah “Membangun serta mewujudkan Tuban sejahtera, berkeadilan, berbudaya, berdaya saing dan berbasis lingkungan”.

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam 4 (empat) misi, yaitu :

1. Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi local dan pengembangan ekonomi kreatif;

3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih;
4. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif;

Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan berkaitan dengan pencapaian misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu “Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif,” yang kemudian dijabarkan melalui Tujuan “Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik” dengan sasaran :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel;
3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima;

Memperhatikan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan tersebut diatas, maka Penunjang Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi yang strategis dalam pencapaian kedua sasaran pembangunan daerah tersebut

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan jangka menengah dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan penjabaran dari sasaran strategis Kepala Daerah dalam RPJMD terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida sebagai perangkat daerah pelaksana urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Renstra OPD. Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai perangkat daerah turut bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran strategis Kepala Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah:
2. Birokrasi yang kapabel.

Tujuan ini menggambarkan bagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Tuban. Indikator ketercapaian dari tujuan ini digambarkan oleh peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan peningkatan indeks inovasi daerah.

Berdasarkan tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 diatas maka sasaran strategis yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama beserta target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 yaitu sebagaimana tabel 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban
Renstra Tahun 2021-2026

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	Jumlah sasaran dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75% dibagi jumlah sasaran dalam RPJMD dikali 100%	94,00%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	Jumlah program dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75% dibagi jumlah program dalam RPJMD dikali 100%	92,50%
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	Jumlah inovasi tahun n dikurangi jumlah inovasi tahun n-1 dibagi dengan jumlah inovasi tahun n-1 dikalikan seratus persen	10,00%

Sumber : Renja Bapperida Tahun 2025

2.1.2. Rencana Strategis 2025-2029

Visi dan Misi

Rencana Starategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 di susun selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah:

“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Misi “Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “*Mbangun Deso*”, “*Noto Kutho*”, “*Sejahtera*”, “*Berkeadilan*”, dan “*Berkelanjutan*”. Misi ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antara desa dan kota melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan aksesibilitas jalan, transportasi, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas publik lainnya, diharapkan pembangunan dapat lebih merata. Selain itu, pendekatan berwawasan lingkungan menjadi prinsip utama dalam mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya fungsional tetapi juga ramah lingkungan. Setiap pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem, penggunaan sumber daya yang efisien, serta penerapan teknologi hijau guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan implementasi yang terarah dan terukur, diharapkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dapat menjadi pondasi utama bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Misi “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “*Kolaborasi*”, “*Inovasi*”, “*Karya*”, “*Sejahtera*”, “*Berbudaya*”, dan “*Berkelanjutan*”. Peningkatan nilai tambah merupakan kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena melalui peningkatan nilai tambah maka hasil bagi kesejahteraan pemilik usaha ataupun pekerja menjadi lebih besar. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta memperkuat daya saing sektor-sektor unggulan. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan nilai tambah serta pemberdayaan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.
3. Misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “*Inovasi*”, “*Sejahtera*”, “*Berbudaya*”, dan “*Berkeadilan*”. Fokus dari penyelenggaraan misi ini adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun produktivitas (ekonomi) individu maupun keluarganya. Misi ini merupakan langkah strategis dalam membangun Kabupaten Tuban yang sejahtera dan maju dengan menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor utama dalam kemajuan daerah. Penguatan kualitas SDM menjadi prioritas utama, karena masyarakat yang terdidik, sehat, dan produktif merupakan aset berharga bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta daya saing daerah. Lebih dari itu, pembangunan SDM yang dilakukan harus tetap bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Setiap inisiatif pembangunan harus

memperhatikan norma sosial, menjaga harmoni masyarakat, serta tetap menghormati identitas budaya yang menjadi ciri khas Kabupaten Tuban.

4. Misi “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Kolaborasi”, “Inovasi”, “Karya”, dan “Lanjutkan!”. Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, profesional, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip *good governance*, Kabupaten Tuban diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Tuban akan memiliki pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Digitalisasi layanan akan meningkatkan efisiensi birokrasi, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah. Keberhasilan misi ini akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berintegritas, yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bapperida, diketahui bahwa Tujuan dan Sasaran Renstra memiliki keterkaitan dengan Misi 4 yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Bapperida merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan

yaitu 2025-2029. Tujuan ini menjadi petunjuk arah Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya. Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tujuan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dapat ditentukan dengan didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) atau dapat pula didasarkan pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Tuban, terdapat NSPK yakni Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dan sasaran RPJMD berupa “Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel” dan “Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis digital”. Poin-poin tersebut dinilai relevan dengan kewenangan Bapperida Kabupaten Tuban.

Tujuan pembangunan jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan penjabaran dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan sasaran strategis Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai perangkat daerah pelaksana urusan penunjang berupa perencanaan pembangunan, pengembangan inovasi, dan riset daerah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai Perangkat Daerah turut bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran strategis Kepala Daerah. Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah”.

Tujuan ini menggambarkan bagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban berperan dalam mendukung pencapaian visi dan

misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban. Tujuan ini memiliki 2 indikator tolak ukur untuk mengukur ketercapaian peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan inovasi daerah. Indikator tersebut terdiri dari Nilai Komponen Perencanaan SAKIP dan Indeks Inovasi Daerah.

Adapun sasaran merupakan serangkaian kinerja yang dapat diwujudkan dalam bentuk tahapan, fokus, ataupun aspek prioritas dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan renstra. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yakni:

1. Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
3. Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah

Masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan ketercapaiannya melalui indikator yang terukur. Indikator dapat memudahkan kontrol apakah sebuah kinerja telah dilaksanakan secara optimal. Indikator yang dijadikan acuan sasaran terdiri dari:

1. Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
3. Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111

Guna pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis . Indikator kinerja utama beserta target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 yaitu sebagaimana tabel 2.1.2 berikut :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban
Renstra Tahun 2025-2029

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang Mencapai Target / Jumlah Seluruh Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah X 100%	62,50%
2	Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	Jumlah Inovasi dengan Nilai Kematangan 81- 111 / Jumlah Seluruh Inovasi X 100%	18,89%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,89

Sumber : Perubahan Renja Bapperida Tahun 2025

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja 2025. Dimana dalam Perubahan Rencana Kerja 2025 terdapat perubahan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di buat berdasarkan 2 (dokumen) Rencana Strategis yaitu Renstra 2021-2026 untuk Perjanjian Kinerja 2025 dan Renstra 2025-2029 untuk Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)

Penetapan kinerja tahunan tahun 2025 (Renstra 2021-2026) meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja beserta targetnya dan dituangkan dalam Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dengan Bupati Tuban sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	1.1	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	94	%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	2.1	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	92,5	%

3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	3.1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	10	%
---	--	-----	---	----	---

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp4.443.430.306,00	APBD
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp2.772.328.912,00	APBD
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp4.008.854.600,00	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.506.259.237,00	APBD
	TOTAL	Rp24.730.873.055,00	

2.2.2 Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Bapperida Tahun 2025-2029. Adapun didalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp16.693.818.927,00, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.2.2 berikut :

Tabel 2.2.2
Lampiran Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	1.1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	62,5	%
2	Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	2.1	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	18,89	%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,89	Angka

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.379.775.315,00	P-APBD
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp2.599.929.423,00	P-APBD
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.860.132.832,00	P-APBD
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp1.784.706.757,00	P-APBD
5	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rp69.274.600,00	P-APBD
TOTAL		Rp16.693.818.927,00	

2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

Dalam revisi perjanjian kinerja Tahun 2025 yang menyesuaikan Rencana Strategis Bapperida tahun 2025-2029 terdapat penyesuaian sasaran strategis dimana 2 (dua) sasaran strategis di rubah, 1 (satu) sasaran strategis dihapus dan 1 (satu) sasaran strategis ditambahkan. Secara garis besar ringkasan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2.3 berikut :

Tabel 2.2.3

Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KET.
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Berubah
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)				Dihapus
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	2	Meningkatnya Kematangan Inovasi	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	Berubah
			3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Ditambahkan

				Terhadap Layanan		
--	--	--	--	---------------------	--	--

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk dari perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dari kinerja organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan keberhasilan dan kegagalan dalam laporkan secara periodik setiap tahun, dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pelaporan ini juga dimaksudkan sebagai pendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas Kinerja juga merupakan ukuran sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan evaluasi dan perbaikan kinerja maka dapat meminimalisir potensi kegagalan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi secara umum didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil organisasi dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Kinerja tidak hanya diukur dari *output*, tetapi juga *outcome*, manfaat, dan dampak yang dihasilkan. Didalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP), sebuah pencapaian kinerja organisasi harus selaras dan berkaitan erat dengan proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja , pelaporan dan evaluasi kinerja.

Adapun tujuan pengukuran capaian kinerja organisasi, antara lain :

- 1) Menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 2) Peningkatan akuntabilitas;
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja organisasi;
- 4) Sebagai bahan pengambilan kebijakan manajerial organisasi;
- 5) Mendorong efektifitas dan efisiensi organisasi;
- 6) Mendorong peningkatan motivasi dan capaian kinerja pegawai.

"

A. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026))

Didalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Meskipun dalam perubahan uraian tugas fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban mengampu urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah, namun dalam dokumen perencanaan nomenklatur urusan yang di ampu adalah Urusan Perencanaan dan Urusan penelitian dan Pengembangan.

Pada Rencana Strategis Bapperida 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban terdapat 2 urusan yaitu Urusan Perencanaan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan guna mencapai tujuan organisasi. Tujuan pertama yaitu *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”* dengan sasaran strategis : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah, dan 2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tujuan kedua yaitu *“Birokrasi yang kapabel”* dengan sasaran strategis Meningkatkan kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Capaian Kinerja Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026 dihitung berdasarkan capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025. Mengingat terdapat peralihan penerapan rencana strategis dari Renstra 2021-2026 menjadi Renstra 2025-2029. Adapun capaian kinerja sampai dengan TW-3 beserta anggaran sebagai tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja s/d TW-3

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BAPPERIDA			24.730.873.055		9.335.554.805		
	URUSAN : PERENCANAAN			20.722.018.455		8.054.380.305		
	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai komponen perencanaan pada SAKIP Daerah	24,79	20.722.018.455	Belum Rilis	8.054.380.305		
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sasaran Pembangunan Daerah	Persentase capaian sasaran RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	94,00	17.949.689.543	Belum Rilis	7.282.087.052		

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Outcome: Meningkatnya konsistensi program prioritas pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD	97,70	4.443.430.306	95,10	1.185.418.596	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan tahunan	Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan	5,00	1.730.575.850	3	692.876.570	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Dokumen : 1. RPJMD 2025-2029, 2. P-RKPD 2025 3. RKPD 2026 4. Rantek RKPD 2027
	Tersusunnya Analisis data dan informasi hasil pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Analisis dan Profil Pembangunan Daerah	2,00	366.499.956	1	24.318.026	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Analisis Data untuk Perencanaan 2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah (buku dan video)

"

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terimplementasinya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi SIPD Terimplementasi	1,00	119.670.000	1	77.737.500	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri
	Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pendukungnya	8,00	2.226.684.500	4	390.486.500	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen : 1. Laporan pengendalian dan evaluasi TW 1, 2, 3 dan 4 2. Penyusunan dokumen Indeks Layak Huni 3. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 4. Indeks Kerukunan Umat Beragama 5. Nilai Tukar Petani
	Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,00	13.506.259.237	83,25	6.096.668.456	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah hasil perencanaan perangkat daerah	10,00	272.499.950	8	53.065.210	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen : 1. Renja 2026 2. Renja P-2025 3. Renstra Bapperida 2025-2029 4. Dokumen Manajemen Risiko Bapperida 5. LPPD 2024 6. LKJIP 2024 7. Laporan Dalev Per Tri Bulan (4 Lap.)
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah hasil administrasi keuangan	27,00	10.407.943.370	22	5.403.349.982	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pembayaran gaji dan Tunjangan Bulanan 2. Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN 3. Laporan pengelolaan keuangan bulanan/tribulan/se mesteran SKPD
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi	70,00	250.945.200	0	-	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-

"

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sumber daya aparatur						
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis adminitrasi perkantoran yang disediakan	6,00	963.635.77 9	6	259.289.61 4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan ATK, bahan cetakan, logistik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan rapat-rapat koordinasi luar daerah
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pengadaan barang milik daerah	13,00	402.124.62 4	Dibatalkan Karena Efisiensi	-	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Meningkatnya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	40,00	602.382.94 4	37	279.509.95 8	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pembayaran gaji, BPJS, JKK dan JKN Non ASN.

"

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30,00	606.727.370	23	101.453.692	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Mobil dan sepeda motor), Pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin
	Sasaran : Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase Capaian Program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	92,50	2.772.328.912	Belum Rilis	772.293.253		

■

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Outcome: Meningkatnya konsistensi program daerah dengan Perangkat Daerah pada mitra bidang Ekonomi, Infrastruktur, SDA dan Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran Program RPJMD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100,00	2.772.328.912	100	772.293.253	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase Penjabaran Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100,00		100			

"

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah mitra bidang pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3,00	891.026.412	0	232.992.080	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2024 2. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2026 3. Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024
	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah mitra bidang ekonomi dan SDA	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Perekonomian dan SDA	2,00	1.306.396.000	0	185.552.446	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Penyusunan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2. Penyusunan Dokumen Strategi Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tuban

"

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Sumber Daya Alam)						
	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah mitra bidang infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2,00	574.906.500	0	353.748.727	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Penyusunan Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan Kabupaten Tuban 2. Review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
	URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			4.008.854.600		1.281.174.500	URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

"

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan: Birokrasi yang kapabel	Indeks Inovasi Daerah	68,00	4.008.854.600	Belum Rilis	1.281.174.500		
	Sasaran: Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi	10,00	4.008.854.600	Belum Rilis	1.281.174.500		
	Outcome: Meningkatnya hasil kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan daerah dan perangkat daerah	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan	7	4.008.854.600	5	1.281.174.500	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	

■

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	2.334.386.600	0	30.785.000	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kelitbangan
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang bias menjadi inovasi penyelenggaraan sosial dan kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang sosial dan kependudukan	2	326.136.000	2	306.630.000	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penyusunan Dokumen Kajian : 1) Dokumen Kajian Standarisasi Fasilitas Pendidikan Dasar Ramah Anak di Kabupaten Tuban 2) Dokumen Kajian Pengaruh Unmet Need Terhadap Kematian Ibu di Kabupaten Tuban

"

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang bias menjadi inovasi penyelenggaraa n ekonomi dan pembangunan	Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5	705.442.000	4	669.521.340	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penyusunan Dokumen Kajian : 1) Dokumen Kajian Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Tuban 2) Dokumen Kajian Optimalisasi Air Tanah Karst sebagai Pemasok Air Domestik pada Kawasan Krisis Air di Kabupaten Tuban 3) Dokumen Kajian Analisis Pengembangan Potensi Hutan Bakau di Kabupaten Tuban 4) Dokumen Kajian Analisis Backlog Perumahan dan Strategi Pemerintah Dalam Pengadaan Perumahan Bagi Masyarakat

"

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (s.d. TW-3)	Realisasi Anggaran (s.d. TW-3) (Rp)	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang telah Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5	642.890.000	2	274.238.160	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1) Pelaksanaan Lomba Tuban Berinovasi (TUBERNOVA) tingkat OPD/Kecamatan/Puskesmas & Masyarakat 2) Koordinasi dan Pengumpulan Data Dukung Inovasi Kabupaten Sesuai Indikator pada Innovative Government Award (IGA) 3) Pembinaan serta Pendampingan Inovator Kabupaten Tuban (TubanTekno - Inkubasi Inovasi) 4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Melalui Aplikasi SISEVA (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah) 5) Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (Ruang KI - Kekayaan Intelektual)

B. Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan guna penyesuaian perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025. Perubahan ini juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029. Pengukuran pencapaian kinerja atas perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang berhasil dicapai tahun ini.

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi dilakukan guna mendapatkan persentase tingkat pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya tingkat capaian kinerja maka dapat diukur sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja juga dapat dijadikan bahan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja.

Perbandingan Kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun anggaran 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029. Berdasarkan data dukung dan indikator yang ada, capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2025 dapat dilihat sesuai tabel 3.1.1 sebagai berikut :

■

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
	BAPPERIDA				
	URUSAN : PERENCANAAN				
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	25,93	25,70	99,11%
A	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	62,50	53,13	85,01%
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	70,00	51,81	74,01%
1.1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan berbasis risiko	5,00	5,00	100,00%
1.2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen analisis dan profil pembangunan daerah	2,00	2,00	100,00%
1.3	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di	Jumlah Aplikasi SIPD Terimplementasi	1,00	1,00	100,00%

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Bidang Pembangunan Daerah				
1.4	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pendukungnya	8,00	8,00	100,00%
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	70,18	67,65	142,50%
		Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00%
		Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK)	71,15	57,14	80,30%

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
		Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00%
2.1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	19,00	19,00	100,00%
2.2	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	7,00	7,00	100,00%

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.3	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	3,00	3,00	100,00%
B	Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,89	89,93	100,04%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,15	83,25	100,12%
3.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	10,00	10,00	100,00%
3.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	5,00	5,00	100,00%
3.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1,00	1,00	100,00%
3.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6,00	6,00	100,00%

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
3.5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	10,00	10,00	100,00%
3.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12,00	12,00	100,00%
	URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	57,00	69,41	121,77%
C	Sasaran: Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	18,89	40,11	212,32%
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan	7	7,00	100,00%
4.1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	1,00	100,00%
4.2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang	2	2,00	100,00%

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
		sosial dan kependudukan			
4.3	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5	5,00	100,00%
4.4	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5	5,00	100,00%
5	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah	88,28	92,61	104,90%
5.1	Kegiatan : Inovasi dan Inovasi	Jumlah laporan hasil inovasi dan inovasi	2	2,00	100,00%

Sumber : Bapperida Kab. Tuban Tahun 2025

Pada tahun 2025, Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban telah menyusun perubahan Rencana Strategis untuk Tahun 2025-2029. Hal ini kemudian diturunkan dalam perubahan rencana kerja (Renja) 2025. Didalam perubahan Renja 2025 terdapat tiga Sasaran Strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Berdasarkan Tabel 3.1.1 diatas, 2 (dua) Sasaran Strategis telah berhasil mencapai target

kinerja yang di bebaskan di tahun 2025 ini, sedangkan 1 (Satu) sasaran strategis belum dapat di capai target kinerjanya.

Sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah belum dapat tercapai kinerjanya. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 62,5 %, sampai saat ini realisasi kinerjanya baru pada angka 53,13 % atau tingkat capaiannya sebesar 85,01 %. Dari 32 Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah ditetapkan, baru 17 Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerjanya atau capain kinerjanya lebih atau sama dengan 100%. Beberapa faktor dari ketidaktercapaian target kinerja yang ditetapkan pada sasaran ini antara lain belum dirilisnya sejumlah data indikator capaian tujuan dan sasaran daerah sampai dengan akhir tahun 2025. Dari total 32 Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah, terdapat 3 Indikator yang belum rilis datanya sehingga data yang dipakai adalah data capaian pada Tahun 2024. Faktor lain yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target kinerja antara lain Pelaksanaan Program /Kegiatan belum berdampak secara signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Selain itu belum optimalnya kualitas data juga menjadi perhatian sendiri guna optimalisasi kualitas dokumen perencanaan.

Tahun 2025 mungkin merupakan tahun yang luar biasa bagi penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan melalui peningkatan kualitas riset dan inovasi daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Sasaran Strategis ke-2 yaitu Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111 tingkat capaian kinerjanya mencapai 212,32 %. Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 18,89 %, dengan sangat luar biasa dapat dicapai sebesar 40,11 %. Dari total inovasi yang ada di Kabupaten Tuban yaitu sejumlah 187 Inovasi, sejumlah 75 Inovasi telah berhasil mencapai tingkat kematangan 81-111. Kesuksesan dalam mencapai target kinerja ini tidak lepas dari tingginya komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah. Pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kualitas riset dan inovasi dilakukan secara kolaboratif dengan menggandeng seluruh *stakeholder* dalam unsur *Pentahelix*. Hal ini menegaskan paradigma baru dalam

"

penyelenggaraan administrasi publik yang tidak terkesan “*one man show*” dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan dibidang riset dan inovasi daerah.

Upaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan berbuah manis. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban di tahun 2025 mencapai 89,93 dari Target kinerja yang ditetapkan sebesar 89,89. Dengan realisasi kinerja tersebut, Sasaran Strategis ke-3 ini telah berhasil mencapai tingkat capain kinerjanya sebesar 100,04 %. Pecapaian ini tidak lepas dari upaya peningkatan layanan terutama dalam Perbaikan kualitas pelayanan publik dengan penyusunan Standar Dokumen Pelayanan Publik. Penyusunan Standar pelayanan Publik dilakukan melalui Forum Konsultasi publik (FKP) yang melibatkan unsur *Pentahelix* sebagai upaya peningkatan kualitas layanan secara kolaboratif. Upaya lain yaitu dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, serta peningkatan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan berbagai tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dilakukan guna mengetahui grafik perkembangan tingkat capaian kinerja yang ditelah ditetapkan dari tahun ke tahun. Namun demikian perbandingan untuk tahun 2025 tidak dapat dilakukan secara efektif dikarenakan terdapat perbedaan sasaran indikator kinerja antara tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan sasaran dan indikator kinerja menyesuaikan dengan perubahan Rencana Strategis 2025-2029.

Sasaran Strategis ke-1 yaitu Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah pada tahun 2025, capaian kinerjanya di hitung dengan formulasi Jumlah Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang Mencapai Target / Jumlah Seluruh Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah X 100%. Indikator dan formulasi ini memungkinkan untuk dihitung pada

tahun-tahun lalu, namun tidak dapat di perbandingkan dengan capaian kinerja tahun ini karena tidak relevan dan bukan merupakan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pun demikian dengan sasaran strategis ke-2, dapat di hitung tetapi tidak relevan untuk diperbandingkan karena target kinerja yang dihitung berdasarkan Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111 baru di targetkan tahun ini. Sasaran Strategis ke-3 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah juga baru di targetkan tahun ini dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat juga baru dilakukan di tahun 2025 secara mandiri.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

N O	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	n/a	24,55	24,75	25,93	n/a	24,68	25,63	25,70	n/a	100,5 3%	103,5 6%	99,11 %
1	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	n/a	n/a	n/a	62,50	n/a	n/a	n/a	53,13	n/a	n/a	n/a	85,01 %
1	PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	n/a	n/a	n/a	70,00	n/a	n/a	n/a	51,81	n/a	n/a	n/a	74,01 %

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1 . 1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan berbasis risiko	8,00	8,00	6,00	5,00	8,00	8,00	6,00	5,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
1 . 1 . 1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
1 . 1 . 2	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
1 . 1 . 3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1 . 1 . 4	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	525,0 0	1.000 ,00	535,0 0	1.000 ,00	1.057 ,00	1.413 ,00	535,0 0	930,0 0	201,3 3%	141,3 0%	100,0 0%	93,00 %
1 . 1 . 5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJ MD/RKPD)	4,00	4,00	6,00	3,00	4,00	4,00	6,00	3,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
1 . 2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen analisis dan profil pembanguna n daerah	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1 . 2 . 1	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembanguna n Daerah (Semua Perencanaan Pembanguna n Daerah)	n/a	n/a	1,00	1,00	n/a	n/a	1,00	1,00	n/a	n/a	100,0 0%	100,0 0%
1 . 2 . 2	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
1 . 2 . 3	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembanguna n Daerah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Kabupaten/Kota	yang Diterbitkan												
1 . 3	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi SIPD Terimplemen tasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
1 . 3 . 1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1 . 4	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembanguna n daerah dan pendukungn ya	13,00	14,00	11,00	8,00	13,00	14,00	11,00	8,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
1 . 4 . 1	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembanguna n	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%
1 . 4 . 2	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembanguna n Daerah	13,00	14,00	11,00	5,00	13,00	14,00	11,00	5,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintah n dan Pembanguna n Manusia (PPM)	n/a	n/a	n/a	70,18	n/a	n/a	n/a	67,65	n/a	n/a	n/a	96,40 %
		Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Pemerintah n dan Pembanguna n Manusia (PPM) dalam Renja Perangkat Daerah	90,00	99,65	100,0 0	100,0 0	99,64	100,0 0	100,0 0	100,0 0	110,7 1%	100,3 5%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perekonomi an, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK)	n/a	n/a	n/a	71,15	n/a	n/a	n/a	57,14	n/a	n/a	n/a	80,30 %
		Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Perekonomi an, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renja Perangkat Daerah	90,00	99,65	100,0 0	100,0 0	99,64	100,0 0	100,0 0	100,0 0	110,7 1%	100,3 5%	100,0 0%	100,0 0%
2 . 1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti koordinasi	n/a	n/a	n/a	19,00	n/a	n/a	n/a	19,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	dan Pembangunan Manusia	perencanaan dan pengendalian pembanguna n daerah Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia												
2 . 1 . 1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintaha n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
2 . 1 . 2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
2 . 1 . 3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pemerintah an	-	2,00	3,00	3,00	-	2,00	3,00	3,00	n/a	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
2 . 1 . 4	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	100,0 0%	150,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
2 . 1 . 5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4,00	4,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		Pembangunan Manusia												
2 . 2	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	n/a	n/a	n/a	7,00	n/a	n/a	n/a	7,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%
2 . 2 . 1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		nya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
2 . 2 . 2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4,00	4,00	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
2 . 2 . 3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Bidang Perekonomian	Bidang Perekonomian												
2 . 2 . 4	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
2 . 2 . 5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		Daerah Bidang SDA												
2 . 3	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti koordinasi perencanaan dan pengendalian pembanguna n daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%
2 . 3 . 1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD,	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		RPJMD dan RKPD)												
2 . 3 . 2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
2 . 3 . 3	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
2 . 3 . 4	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		Bidang Kewilayahan												
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	61,00	63,00	65,00	57,00	56,10	46,70	55,60	69,41	91,97 %	74,13 %	85,54 %	121,7 7%
2	Sasaran : Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	n/a	n/a	n/a	18,89	n/a	n/a	n/a	40,11	n/a	n/a	n/a	212,3 3%
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH*	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan	5,00	5,00	6,00	7,00	5,00	5,00	6,00	7,00	100,00 %	83,33 %	100,0 0%	100,0 0%
4 . 1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembang	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	dan Pengkajian Peraturan*	an Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan												
4 . 1 . 1	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Pemerintahan Umum	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00 %	200,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
4 . 2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan *	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang sosial dan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		kependudukan												
4 . 2 . 1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang an Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	n/a	n/a	100,0 0%	100,0 0%
4 . 2 . 2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang an Pengendalian Penduduk	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		dan Keluarga Berencana												
4 . 3	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	5,00	5,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
4 . 3 . 1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
4 . 3 . 2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	n/a	n/a	n/a	100,00 %

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		Lingkungan Hidup												
4 . 3 . 3	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang an Kehutanan	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%
4 . 3 . 4	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang an Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
4 . 4	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	Jumlah Dokumen/La poran Pengembang an Inovasi dan Teknologi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
4 . 4 . 1	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembang an, dan Perekayasaa n di Bidang Teknologi dan Inovasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
4 . 4 . 2	Sub Kegiatan : Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mod el Replikasi dan Invensi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Penerapan Teknologi*	di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi												
4 . 4 . 3	Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggar aan Pemerintah n Daerah yang Bersifat Inovatif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
4 . 4 . 4	Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Sosialisasi dan Diseminasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		Hasil-Hasil Kelitbangan												
4 . 4 . 5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
5	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunaka n sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah	n/a	n/a	n/a	88,28	n/a	n/a	n/a	92,61	n/a	n/a	n/a	104,9 0%
5 . 1	Kegiatan : Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan hasil invensi dan inovasi	n/a	n/a	n/a	2,00	n/a	n/a	n/a	2,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
5 . 1 . 1	Sub Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%
5 . 1 . 2	Sub Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%
	Penunjang													

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	89,89	n/a	n/a	n/a	89,93	n/a	n/a	n/a	100,0 4%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01	82,25	82,75	83,15	82,05	82,50	82,65	83,25	102,5 5%	100,3 0%	99,88 %	100,1 2%
3 . 1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi yang tersusun	n/a	9,00	9,00	10,00	n/a	9,00	9,00	10,00	n/a	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 . 1 . 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3 . 1 . 2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 . 1 . 3	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	3,00	3,00	7,00	3,00	3,00	3,00	7,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3 . 2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9,00	27,00	27,00	5,00	9,00	27,00	27,00	5,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3 . 2 . 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34,00	34,00	51,00	70,00	34,00	37,00	57,00	70,00	100,00 %	108,82 %	111,76 %	100,00 %
3 . 2 . 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,00	9,00	9,00	12,00	9,00	9,00	9,00	11,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	91,67 %

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3 . 2 . 3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	-	14,00	14,00	23,00	-	14,00	14,00	20,00	n/a	100,0 0%	100,0 0%	86,96 %
3 . 3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%
3 . 3 . 1	Sub Kegiatan : Bimbingan teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	57,00	60,00	62,00	10,00	57,00	60,00	105,0 0	10,00	100,0 0%	100,0 0%	169,3 5%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Perundang- Undangan*	Peraturan Perundang- Undangan												
3 .3 .2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	34,00	-	1,00	-	62,00	-	1,00	n/a	182,3 5%	n/a	100,0 0%
3 .4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	6,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 .4 .1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3 .4 .2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 .4 .3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 .4 .4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 .4 .5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

”

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3 . 4 . 6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,00	30,00	30,00	25,00	117,0 0	38,00	30,00	25,00	390,0 0%	126,6 7%	100,0 0%	100,0 0%
3 . 5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 . 5 . 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2,00	2,00	2,00	12,00	2,00	2,00	2,00	12,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3 . 5 . 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,00	2,00	3,00	9,00	2,00	2,00	3,00	9,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 . 5 . 3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,00	3,00	3,00	12,00	3,00	3,00	3,00	12,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 . 6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	n/a	n/a	n/a	12,00	n/a	n/a	n/a	12,00	n/a	n/a	n/a	100,0 0%

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3 . 6 . 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3,00	3,00	3,00	30,00	3,00	3,00	3,00	23,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	76,67 %
3 . 6 . 2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1,00	1,00	2,00	20,00	1,00	1,00	2,00	20,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3 . 6 . 3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

"

N O	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3 . 6 . 4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
3 . 6 . 5	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

Sumber : Bapperida Kab. Tuban Tahun 2025

"

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 berdampak pada perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban untuk tahun 2025-2029. Rencana Strategis 2025-2029 menargetkan capaian kinerja pada akhir periode renstra yang harus dicapai antara lain : 1. Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah sebesar 78,13 %; 2. Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111 sebesar 28,89 %; dan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah sebesar 93,39.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis 2025-2019 dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemajuan dan tingkat ketercapaian target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan. Perbandingan ini juga dapat dibuat acuan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, atau menyesuaikan target kinerja jangka menengah melalui Perubahan Rencana Strategis.

Adapun perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan target Kinerja Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	53,13	78,13	68,01%
2	Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	40,11	28,89	138,84%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,93	92,39	97,34%

Sumber : Bapperida Kab. Tuban Tahun 2025

Tingkat kemajuan capaian sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kabupaten Tuban dihitung berdasarkan capaian kinerja tahun aktif, jadi tingkat kemajuan terhadap target Renstra dihitung berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran pada tahun berkenaan. Berdasarkan table 3.1.3 diatas dapat uraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah, pada tahun 2025 realisasinya mencapai 53,13 %. Rendahnya capaian kinerja sasaran ini dikarenakan belum rilisnya sejumlah data capaian tujuan dan sasaran daerah. Dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 ditetapkan target kinerja sebesar 78,13% pada akhir periode Renstra. Dengan realisasi di tahun 2025 tersebut maka tingkat kemajuan dalam mencapai tujuan jangka menengah organisasi mencapai 68,01%.
2. Sasaran strategis ke-2 berupa “Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah” dengan indikator Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111 didapat realisasi kinerja di tahun 2025 sebesar 40,11 %. Dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 ditetapkan target akhir kinerja sebesar 28,89%. Dengan dicapainya realisasi di tahun 2025 maka dapat dipastikan target kinerja jangka menengah pada sasaran ini telah tercapai di tahun awal ini dengan tingkat kemajuan mencapai 138,84 %. Dengan terlampauinya target kinerja jangka menengah tentunya dapat dibuat acuan untuk penyesuaian target kinerja agar terdapat peningkatan di tahun-tahun berikutnya.
3. Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Kabupaten Tuban mencapai 89,93. Dengan target kinerja jangka menengah sebesar 92,39 maka tingkat kemajuan pada indikator sasaran ini mencapai 97,34 %. Meskipun belum mencapai 100 %, tetapi hasil ini tentunya sudah sesuai dengan pentahapan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029.

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (*Benchmark Kinerja*)

Perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah dengan perangkat daerah *se-type* ditingkat Provinsi dimaksudkan untuk mengetahui keselarasan capaian kinerja daerah dengan capaian kinerja di atasnya dan

juga sebagai tolak ukur pencapaian kinerja. Meskipun indikator kinerja sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban tidak sama dengan instansi di atasnya yaitu BAPPEDA Prov. Jatim dan BRIDA Prov. Jatim, namun demikian beberapa komponen data dukung indikator yang sama dapat dijadikan *Benchmark* Kinerja.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dengan sasaran strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur serta Bida Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tabel 3.1.4 berikut :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Organisasi Lain Yang Setipe
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		Bapperida Kab. Tuban	Bappeda Prov. Jawa Timur	Brida Prov. Jatim
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	53,13	-	-
2	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	40,11	-	83,5*
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,93	-	85,45

Sumber : Bapperida Kab. Tuban Tahun 2025

Indikator kinerja sasaran organisasi yang se-*Type* dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban yang dapat diperbandingkan hanya pada Organisasi Bida Provinsi Jawa Timur yang mampu urusan penelitian dan pengembangan. Perbandingan ini dilakukan karena beberapa indikator kinerja sesuai

dengan indikator kinerja yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Pada tahun 2025, Persentase inovasi dengan nilai kematangan tinggi pada Bida Provinsi Jawa timur ditargetkan sebesar 83,5 %. Meskipun belum terdapat data rilis capaian kinerja kematangan inovasi, namun demikian dengan estimasi ketercapaian kinerja yang ditetapkan maka Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111 di Kabupaten Tuban perlu di tingkatkan lebih tinggi untuk mengejar tingkat kematangan inovasi di Provinsi Jawa Timur.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban relative lebih tinggi apabila dibandingkan dengan organisasi sejenis di Provinsi Jawa timur. Berdasarkan rilis Bida Provinsi Jawa Timur pada laman <https://ppid.brida.jatimprov.go.id/>, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bida Provinsi Jawa timur sebesar 85,45.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dilakukan guna merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui penyebab, maka alternatif solusi dapat dirumuskan dengan baik. Adapun penyebab sesuai tabel berikut :

Tabel 3.1.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Penyesuaian target pada beberapa indikator Tujuan dan Sasaran Daerah sesuai dengan SE Sekdaprov terkait penyalarsan IUP dan RPJMD, sehingga ketercapaian realisasinya kurang optimal	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas OPD untuk penyusunan program percepatan pencapaian target tahunan	1. Integrasi Aplikasi e-Monev; 2. Optimalisasi Portal Tuban Satu Data;
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	Belum efektifnya pemanfaatan satu data serta pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kegiatan untuk mendukung keberhasilan program	1. Optimalisasi pemutakhiran data serta pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi sebagai dasar penyusunan perencanaan. 2. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas OPD	1. Optimalisasi pemanfaatan Portal Tuban Satu Data; 2. Pemutakhiran data.

"

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Lemahnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data sehingga mempengaruhi proses perencanaan dan penjadwalan sesuai target yang ditetapkan.	Upaya ketersediaan, perbaikan dan pemutakhiran data yang berkualitas dengan penyandingan data OPD dan hasil monitoring Bapperida sebagai bahan perencanaan.	1. Pemutahiran Data; 2. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas perencanaan
	Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renja Perangkat Daerah	Lemahnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data sehingga mempengaruhi proses perencanaan dan penjadwalan sesuai target yang ditetapkan.	Upaya ketersediaan, perbaikan dan pemutakhiran data yang berkualitas dengan penyandingan data OPD dan hasil monitoring Bapperida sebagai bahan perencanaan.	1. Pemutahiran Data; 2. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas perencanaan

"

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK)	Lemahnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data sehingga mempengaruhi proses perencanaan dan penjadwalan sesuai target yang ditetapkan.	1. Upaya ketersediaan, perbaikan dan pemutakhiran data yang berkualitas dengan penyandingan data OPD dan hasil monitoring Bapperida. 2. Akselerasi penyesuaian Kegiatan dan Anggaran.	1. Pemutakhiran Data; 2. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas perencanaan
	Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renja Perangkat Daerah	Lemahnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data sehingga mempengaruhi proses perencanaan dan penjadwalan sesuai target yang ditetapkan.	1. Upaya ketersediaan, perbaikan dan pemutakhiran data yang berkualitas dengan penyandingan data OPD dan hasil monitoring Bapperida. 2. Akselerasi penyesuaian Kegiatan dan Anggaran.	1. Pemutakhiran Data; 2. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas perencanaan

Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	1. Komitmen Kepala Daerah dan OPD dalam menumbuhkembangkan inovasi; 2. Komitmen yang kuat juga terlaksana dalam melengkapi indikator-indikator inovasi (penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam rangka IGA) untuk mencapai kematangan inovasi yang maksimal dan melakukan kebaruan dalam penyelenggaraan inovasi.	1. Pelaksanaan Tuban Tekno-inkubasi inovasi (pendampingan kepada inovator); 2. Sosialisasi dan pelaksanaan Lomba Tuban Berinovasi (TUBERNOVA) Kategori Inovasi Daerah dan Masyarakat; 3. Sosialisasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam rangka <i>Innovative Government Award</i> (IGA); 4. Peningkatan kualitas dan intensitas Pendampingan/Desk Kematangan Inovasi; 5. Diseminasi hasil riset dan inovasi melalui website SISEVA (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah); 6. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan indikator-indikator inovasi (indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam rangka <i>Innovative Government Award</i> /IGA)	1. Memerluas ekosistem inovasi; 2. Apresiasi terhadap para Inovator; 3. Pengembangan aplikasi SISEVA.
--	---	---	---	--

"

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan	Belum optimalnya keberlanjutan dan pemanfaatan inovasi	Monitoring dan evaluasi serta pendampingan keberlanjutan inovasi	Program telah dihapus
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah	1. Hasil penelitian (kajian) masih belum sepenuhnya diimplementasi oleh Perangkat Daerah; 2. Belum optimalnya keberlanjutan dan pemanfaatan inovasi.	Penguatan koordinasi, fasilitasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi sebagai acuan/dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah dengan melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil riset melalui aplikasi Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (SISEVA)	1. Pendampingan inovator ; 2. Pengembangan aplikasi SISEVA

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	1. Komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai dalam upaya memberikan pelayanan publik yang baik; 2. Peningkatan layanan publik dengan penyusunan Standar Dokumen Pelayanan Publik yang melibatkan unsur Pentahelix;	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan unsur Pentahelix sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan secara kolaboratif	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik; 2. Evaluasi berkala terhadap standar pelayanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Pohon kinerja belum menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	1. Penyesuaian pohon kinerja berdasarkan rekomendasi Kemenpan-RB; 2. Perubahan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Optimalisasi <i>crosscutting</i> kinerja antar perangkat daerah; 2. peningkatan kualitas dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja

Sumber : Bapperida Kab. Tuban Tahun 2025

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan guna meminimalisir sumber daya yang terbuang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Beberapa hal yang ingin di capai dalam penguatan efisiensi sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya didalam melakukan program/kegiatan;
- b. Memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunyai sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma;
- c. Meningkatkan kinerja perangkat daerah sehingga hasil atau output-nya semakin maksimal;
- d. Guna mencapai sebuah hasil atau tujuan sasaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban selama tahun 2025, dapat di gambarkan sebagaimana tabel 3.1.6 sebagai berikut :

Tabel 3.1.6
 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban
 Tahun Anggaran 2025

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	BAPPERIDA					90,14	
	URUSAN : PERENCANAAN					89,18	
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	25,93	25,70	99,11	89,18	9,94

ii

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	62,50	53,13	85,01	97,34	-12,33
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	70,00	51,81	74,01	97,66	-23,64
1.1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan berbasis risiko	5,00	5,00	100,00	98,98	1,02
1.1.1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2,00	2,00	100,00	99,96	0,04

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
1.1. 2	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2,00	2,00	100,00	99,28	0,72
1.1. 3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2,00	2,00	100,00	99,32	0,68
1.1. 4	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1.000,00	930,00	93,00	99,45	- 6,45
1.1. 5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	3,00	3,00	100,00	98,86	1,14

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					
1.2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen analisis dan profil pembangunan daerah	2,00	2,00	100,00	96,71	3,29
1.2.1	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1,00	1,00	100,00	96,34	3,66

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
1.2.2	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	42,00	42,00	100,00	96,84	3,16
1.2.3	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1,00	1,00	100,00	96,44	3,56
1.3	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi SIPD Terimplementasi	1,00	1,00	100,00	86,65	13,35

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
1.3.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1,00	1,00	100,00	86,65	13,35
1.4	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pendukungnya	8,00	8,00	100,00	97,35	2,65
1.4.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3,00	3,00	100,00	100,00	-

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						
1.4. 2	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5,00	5,00	100,00	94,75	5,25
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	70,18	67,65	96,40	96,90	-0,50
		Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Pemerintahan dan	100,00	100,00	100,00	96,90	3,10

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
		Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renja Perangkat Daerah					
		Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK)	71,15	57,14	80,30	96,90	-16,60
		Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	96,90	3,10

ii

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2.1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	19,00	19,00	100,00	92,80	7,20
2.1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,00	2,00	100,00	90,70	9,30

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2.1.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1,00	1,00	100,00	82,37	17,63
2.1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3,00	3,00	100,00	95,44	4,56

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2.1.4	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	1,00	100,00	93,62	6,38
2.1.5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1,00	1,00	100,00	89,92	10,08

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2.2	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	7,00	7,00	100,00	98,45	1,55
2.2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	1,00	100,00	99,31	0,69

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2.2.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1,00	1,00	100,00	99,69	0,31
2.2.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1,00	1,00	100,00	99,07	0,93

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2.2.4	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	1,00	100,00	97,38	2,62
2.2.5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1,00	1,00	100,00	96,61	3,39

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2.3	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	3,00	3,00	100,00	97,40	2,60
2.3.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	1,00	100,00	89,59	10,41

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2.3.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1,00	1,00	100,00	99,84	0,16
2.3.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	1,00	100,00	98,14	1,86

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2.3.4	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1,00	1,00	100,00	99,94	0,06
	Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,89	89,93	100,04	85,67	14,37
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,15	83,25	100,12	85,67	14,45

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
3.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	10,00	10,00	100,00	81,94	18,06
3.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	3,00	100,00	84,15	15,85
3.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00	3,00	100,00	90,01	9,99

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
3.1.3	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,00	7,00	100,00	79,26	20,74
3.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	5,00	5,00	100,00	87,81	12,19
3.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70,00	70,00	100,00	87,84	12,16
3.2.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	11,00	91,67	83,98	7,68

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
3.2.3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23,00	20,00	86,96	91,16	-4,21
3.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1,00	1,00	100,00	90,32	9,68
3.3.1	Sub Kegiatan : Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	10,00	10,00	100,00	90,07	9,93

"
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
		Peraturan Perundang-Undangan					
3.3.2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00	1,00	100,00	97,34	2,66
3.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6,00	6,00	100,00	85,55	14,45
3.4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,00	3,00	100,00	99,85	0,15

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
3.4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,00	2,00	100,00	90,18	9,82
3.4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	100,00	82,48	17,52
3.4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	2,00	100,00	92,41	7,59
3.4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5,00	5,00	100,00	97,50	2,50

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
3.4.6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,00	25,00	100,00	77,48	22,52
3.5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	10,00	10,00	100,00	63,98	36,02
3.5.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12,00	100,00	69,88	30,12
3.5.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	9,00	9,00	100,00	58,78	41,22

“

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
3.5.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	12,00	100,00	62,04	37,96
3.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12,00	12,00	100,00	74,72	25,28
3.6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30,00	23,00	76,67	64,48	12,18

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Dinas Operasional atau Lapangan						
3.6.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20,00	20,00	100,00	84,83	15,17
3.6.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2,00	2,00	100,00	97,73	2,27
3.6.4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	1,00	100,00	92,05	7,95

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
3.6.5	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	2,00	100,00	90,43	9,57
	URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					97,85	
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	57,00	69,41	121,77	97,85	23,92
	Sasaran: Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	18,89	40,11	212,32	97,85	114,47

»

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan	7,00	7,00	100,00	98,01	1,99
4.1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1,00	1,00	100,00	97,60	2,40
4.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1,00	1,00	100,00	97,60	2,40

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
4.2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan *	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang sosial dan kependudukan	2,00	2,00	100,00	99,11	0,89
4.2.1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,00	1,00	100,00	99,84	0,16
4.2.2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,00	1,00	100,00	98,40	1,60
4.3	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5,00	5,00	100,00	99,52	0,48

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
4.3.1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2,00	2,00	100,00	99,77	0,23
4.3.2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1,00	1,00	100,00	99,72	0,28
4.3.3	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1,00	1,00	100,00	99,74	0,26
4.3.4	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,00	1,00	100,00	98,46	1,54

ii

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
4.4	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5,00	5,00	100,00	93,81	6,19
4.4.1	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1,00	1,00	100,00	93,78	6,22
4.4.2	Sub Kegiatan : Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1,00	1,00	100,00	100,00	-

”

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
4.4.3	Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1,00	1,00	100,00	98,12	1,88
4.4.4	Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1,00	1,00	100,00	100,00	-
4.4.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1,00	1,00	100,00	84,61	15,39
5	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunakan	88,28	92,61	104,90	93,76	11,14

”

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
		sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah					
5.1	Kegiatan : Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan hasil invensi dan inovasi	2,00	2,00	100,00	93,76	6,24
5.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1,00	1,00	100,00	90,32	9,68

"

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
5.1.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1,00	1,00	100,00	95,03	4,97

ii

Berdasarkan tabel diatas, terdapat *ketidak-efisienan* dalam mencapai sasaran ke-1 yaitu “Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah” dengan indikator kinerja Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah. Dimana tingkat efisiensi pada pencapaian sasaran ini mencapai -12,33 %. Tingginya tingkat ketidakefisienan disebabkan karena tingkat capaian kinerja yang hanya 85,01% sedangkan penggunaan sumber daya anggaran mencapai 97,34 %. Rendahnya tingkat capaian kinerja disebabkan oleh belum rilisnya data kinerja tujuan dan sasaran daerah tahun 2025. Sehingga data yang digunakan adalah data tahun 2024, sedangkan target kinerja tahun 2025 lebih tinggi dari capaian kinerja 2024. Penerapan target kinerja 2025 yang lebih tinggi dari tahun 2024 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kinerja masing-masing perangkat daerah dan mengakselerasi capaian kinerja guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Sasaran ke-2 yaitu Meningkatkan Kematangan Inovasi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111 diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 114,47 %. Tingkat efisiensi yang sangat tinggi ini disebabkan oleh capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai 212,32 %, sedangkan penggunaan sumber daya anggaran sebesar 97,85 %. Lonjakan capaian kinerja tidak lepas dari komitmen pimpinan dan perangkat daerah untuk meningkatkan kematangan inovasi yang ada di masing-masing perangkat daerah. Pendampingan yang masif dengan mengundang berbagai *stakeholder* juga secara signifikan membantu tingkat kematangan inovasi daerah.

Tingkat efisiensi dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di tahun 2025 relatif tinggi yaitu pada angka 14,37 %. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan di tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah mencapai 89,93 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,04%. Efisiensi ini disebabkan adanya efektivitas yang tinggi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya baik anggaran, sarana prasarana maupun sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin.

■

Pada level program, 2 Program telah mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Program Riset dan Inovasi Daerah mencapai tingkat efisiensi sebesar 11,14 %, hal ini didorong tingkat capaian kinerja program ini sebesar 104,90 % sedangkan sumber daya yang digunakan relatif lebih rendah yaitu sebesar 93,76% dari total anggaran. Upaya pencapaian kinerja tak lepas dari komitmen pimpinan yang tinggi dalam upaya pendampingan pengembangan riset dan inovasi. Disisi lain, penghematan penggunaan sumber daya anggaran dilakukan dengan optimalisasi penggunaan aplikasi siseva serta koordinasi secara daring. Program penunjang juga telah berhasil mencapai tingkat efisiensi sebesar 14,45 %. Dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,12 %, program ini hanya menyerap penggunaan sumber daya anggaran sebesar 85,67%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi yang besar-besaran terhadap penggunaan anggaran terutama anggaran perjalanan dinas.

Ketidak-efisienan terjadi pada program yang mengampu urusan perencanaan. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki tingkat efisiensi sebesar -23,64%. Hal ini disebabkan karena tingkat capaian kinerja program ini sangat rendah yaitu hanya sebesar 74,01% sedangkan penggunaan sumberdayanya sebesar 97,66%. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengalami ketidakefisienan meskipun angkanya lebih rendah. Hal ini juga disebabkan adanya tingkat capaian kinerja yang rendah yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada level Kegiatan dan Sub Kegiatan, hampir keseluruhan pelaksanaannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dari total 18 kegiatan, keseluruhannya mencapai tingkat efisiensi yang positif. Ketepatan dalam pencapaian target kinerja di imbangi dengan upaya efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran yang ada. Di level Sub kegiatan, dari 61 Sub Kegiatan, 59 Sub Kegiatan mencapai tingkat efisiensi positif, sedangkan 2 Sub Kegiatan mengalami tingkat efisiensi negatif atau ada ketidak-efisienan. Ketidakefisienan ini terjadi karena gagalnya pencapaian target kinerja yang ada pada 2 Sub Kegiatan tersebut. Tingginya tingkat efisiensi Kegiatan dan Sub Kegiatan terjadi karena adanya upaya untuk mendorong penghematan anggaran terutama pada mata anggaran perjalanan dinas, lembur dan lain-lain.

"

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Perubahan Rencana Strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 berbuah pada konsekuensi perubahan Tujuan dan sasaran Organisasi. Perubahan juga terjadi pada program unggulan yang menjadi tulang punggung pelaksanaan urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan. Terdapat 3 (sasaran) strategis yang didukung oleh beberapa program unggulan. Masing-masing program unggulan telah berhasil menjadi pengungkit keberhasilan dalam mencapai target kinerja strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis ke-1 ,yaitu meningkatnya capaian kinerja perencanaan daerah didukung oleh 2 (dua) program : 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran strategis ke-2 pada masa transisi perubahan Rencana Strategis didukung oleh 2 (dua) program unggulan yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Program Riset dan Inovasi Daerah. Dengan dukungan dua program tersebut peningkatan kematangan inovasi daerah dapat di capai. Sasaran strategis ke-3 yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan didukung oleh Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Masing program unggulan mendukung ketercapaian target kinerja Sasaran Strategis Bapperida yang digambarkan pada tabel 3.1.7 berikut :

Tabel 3.1.7
Analisis Program Kegiatan Penunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Unggulan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi Yang Mendukung
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Didalam program ini terdapat kegiatan berupa penyusunan dokumen perencanaan daerah, dokumen ini disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Seluruh output kegiatan didalam dokumen perencanaan telah ditetapkan secara berjenjang dan selaras guna mendukung capaian <i>outcome/intermediate outcome</i> sehingga berdampak pada ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran daerah. Monitoring dan evaluasi melalui <i>e-monev</i> juga dilakukan guna memastikan ketercapaian target kinerja tujuan dan sasaran daerah, sekaligus mengidentifikasi secara berkala faktor-faktor penghambat ketercapaian kinerja sehingga dapat dilakukan pembenahan atau deregulasi kebijakan perencanaan daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Unggulan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi Yang Mendukung
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tujuan utama dalam pelaksanaan program ini adalah untuk mewujudkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah. Dengan ketercapaian target kinerja level program pada masing-masing perangkat daerah maka capaian kinerja tujuan dan sasaran daerah dapat dicapai. Adapun berbagai kegiatan dalam program ini di tahun 2025 antara lain : koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah, monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan perencanaan perangkat daerah serta penyusunan dokumen kajian yang mendukung perencanaan daerah.
2	Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Didalam program ini terdapat upaya meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah. Inovasi yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya tingkat kematangan inovasi. Dalam program ini, berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat kematangan inovasi antara lain pendampingan kepada inovator untuk peningkatan tingkat kematangan inovasi yang telah dilahirkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Unggulan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi Yang Mendukung
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meskipun program ini baru dilaksanakan pada akhir tahun 2025 namun demikian dapat secara signifikan mendorong peningkatan kualitas serta kematangan inovasi.
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perbaikan kualitas pelayanan publik dilakukan dalam pelaksanaan program ini antara lain penyusunan Standar Dokumen Pelayanan Publik, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta upaya peningkatan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini secara signifikan mendorong tingginya kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Bapperida Kab. Tuban

Berdasarkan tabel di atas, Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang di ampu oleh Bidang Rendalev berkontribusi pada ketercapaian kinerja perencanaan daerah yang ditandai dengan tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran daerah. Dengan fokus utama memastikan kualitas perencanaan daerah dengan program prioritas daerah yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Didalam program ini terdapat kegiatan berupa penyusunan dokumen perencanaan daerah, dokumen ini disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Seluruh *output* kegiatan didalam dokumen perencanaan telah ditetapkan secara berjenjang dan selaras guna mendukung capaian *outcome/intermediate outcome* sehingga berdampak pada ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran daerah. Monitoring dan evaluasi melalui *e-monev* juga dilakukan guna memastikan ketercapaian target kinerja tujuan dan sasaran daerah, sekaligus mengidentifikasi secara berkala faktor-faktor penghambat ketercapaian kinerja sehingga dapat dilakukan pembenahan atau deregulasi kebijakan perencanaan daerah.

Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah juga didukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang di ampu oleh 2 (dua) Bidang yaitu Bidang PPM dan Bidang PSDAIK. Tujuan utama dalam pelaksanaan program ini adalah untuk mewujudkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah. Dengan ketercapaian target kinerja level program pada masing-masing perangkat daerah maka capaian kinerja tujuan dan sasaran daerah dapat dicapai. Adapun berbagai kegiatan dalam program ini di tahun 2025 antara lain : koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah, monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan perencanaan perangkat daerah serta penyusunan dokumen kajian yang mendukung perencanaan daerah. Beberapa kegiatan yang mendukung kedua program unggulan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan Tuban Tekno-inkubasi inovasi (pendampingan kepada inovator);
2. Sosialisasi dan pelaksanaan Lomba Tuban Berinovasi (TUBERNOVA) Kategori Inovasi Daerah dan Masyarakat;

"

3. Sosialisasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam rangka *Innovative Government Award* (IGA);
4. Peningkatan kualitas dan intensitas Pendampingan/Desk Kematangan Inovasi;
5. Diseminasi hasil riset dan inovasi melalui website SISEVA (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah);
6. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan indikator-indikator inovasi (indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam rangka *Innovative Government Award* /IGA)

Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program ini mewadahi perbaikan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dengan penyusunan Standar Dokumen Pelayanan Publik, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta upaya peningkatan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini secara signifikan mendorong tingginya kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Bapperida Kab. Tuban. Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang menjadi indikator kinerja program ini memperoleh penilaian 83,25 atau tingkat capaian kinerjanya 100,12 % dari target yang ditetapkan sebesar 83,15. Hal ini sejalan dengan pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah yang mencapai 89,93 atau tingkat capaian kinerjanya 100,04 %.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 16.693.818.927,- (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut diperuntukan guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mengampu urusan pemerintah yaitu Urusan Perencanaan, dan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi wewenang daerah. Terdapat 5 (lima) Program yang mendukung pencapaian

sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban di Tahun 2025, yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan;
4. Program Riset dan Inovasi Daerah;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran yang dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban di tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 15.047.979.164,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 90,14 %. Secara lengkap realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2025

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	BAPPERIDA	16.693.818.927	15.047.979.164	90,14
	URUSAN : PERENCANAAN	14.839.837.570	13.233.851.434	89,18

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	14.839.837.570	13.233.851.434	89,18
	Sasaran : Meningkatkan Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	4.460.062.255	4.341.440.037	97,34
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.599.929.423	2.538.966.963	97,66
1.1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.184.851.800	1.172.740.191	98,98
1.1.1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	45.570.000,00	45.550.000,00	99,96
1.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	28.075.500,00	27.872.500,00	99,28
1.1.3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	83.007.500,00	82.445.000,00	99,32
1.1.4	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	70.006.440,00	69.620.950,00	99,45
1.1.5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	958.192.360,00	947.251.741,00	98,86

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	209.871.163	202.959.712,00	96,71
1.2.1	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36.375.772,00	35.044.490,00	96,34
1.2.2	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	151.017.185,00	146.237.722,00	96,84
1.2.3	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	22.478.206,00	21.677.500,00	96,44
1.3	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	93.223.500	80.777.500,00	86,65
1.3.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	93.223.500,00	80.777.500,00	86,65
1.4	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.111.982.960	1.082.489.560	97,35
1.4.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
1.4. 2	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	561.982.960,00	532.489.560,00	94,75
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.860.132.832	1.802.473.074	96,90
2.1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	382.967.290	355.404.630	92,80
2.1. 1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.660.900,00	106.714.750,00	90,70
2.1. 2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10.937.758,49	9.009.900,00	82,37
2.1. 3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	151.629.780,00	144.716.580,00	95,44

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.1.4	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.718.259,00	65.270.400,00	93,62
2.1.5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	33.020.592,50	29.693.000,00	89,92
2.2	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	788.985.798	776.761.002	98,45
2.2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	317.655.905,00	315.455.712,00	99,31
2.2.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.323.128,00	8.297.500,00	99,69
2.2.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	137.824.300,00	136.545.500,00	99,07

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pembangunan Daerah di Bidang Perekonomian			
2.2. 4	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	299.207.775,00	291.367.290,00	97,38
2.2. 5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	25.974.690,00	25.095.000,00	96,61
2.3	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	688.179.744	670.307.442	97,40
2.3. 1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.181.000,00	61.977.162,00	89,59
2.3. 2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	23.596.672,00	23.558.500,00	99,84

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.3. 3	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	569.833.600, 00	559.218.780,00	98,14
2.3. 4	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.568.472,0 0	25.553.000,00	99,94
	Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	10.379.775.3 15	8.892.411.397	85,67
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.379.775.3 15	8.892.411.397	85,67
3.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.296.656	150.196.210	81,94
3.1. 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.073.900	75.799.500,00	84,15
3.1. 2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4.694.500	4.225.500,00	90,01
3.1. 3	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.528.256	70.171.210,00	79,26

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
3.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.431.810.887	7.404.074.922	87,81
3.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.353.180.387	7.337.323.122,00	87,84
3.2.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.680.500	57.681.000,00	83,98
3.2.3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.950.000	9.070.800,00	91,16
3.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.066.000	26.252.000	90,32
3.3.1	Sub Kegiatan : Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	28.090.000	25.302.000,00	90,07
3.3.2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	976.000	950.000,00	97,34
3.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	726.555.718	621.585.615	85,55
3.4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	6.595.725	6.586.000,00	99,85

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
3.4. 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.004.873	229.969.894,00	90,18
3.4. 3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.540.140	225.618.900,00	82,48
3.4. 4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.543.000	54.101.700,00	92,41
3.4. 5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	11.802.480	11.508.000,00	97,50
3.4. 6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.069.500	93.801.121,00	77,48
3.5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.651.444	379.189.130	63,98
3.5. 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.020.084	116.017.392,00	69,88
3.5. 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	46.769.100	27.490.300,00	58,78
3.5. 3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	379.862.260	235.681.438,00	62,04
3.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah	416.394.610	311.113.520	74,72

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3.6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.888.104	172.098.058,00	64,48
3.6.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel*	6.400.000	5.429.000,00	84,83
3.6.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	33.900.000	33.131.350,00	97,73
3.6.4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.060.000	96.705.612,00	92,05
3.6.5	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	4.146.506	3.749.500,00	90,43
	URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.853.981.357	1.814.127.730	97,85
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	1.853.981.357	1.814.127.730	97,85
	Sasaran: Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	1.853.981.357	1.814.127.730	97,85

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*	1.784.706.757	1.749.175.330	98,01
4.1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	218.401.675	213.153.000	97,60
4.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum*	218.401.675,00	213.153.000,00	97,60
4.2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan *	314.165.000	311.362.860	99,11
4.2.1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	154.515.000,00	154.264.860,00	99,84
4.2.2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*	159.650.000,00	157.098.000,00	98,40
4.3	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	876.446.496	872.205.260	99,52
4.3.1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	357.773.248,00	356.947.920,00	99,77

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.3. 2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup*	200.450.000,00	199.881.400,00	99,72
4.3. 3	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan*	160.450.000,00	160.039.080,00	99,74
4.3. 4	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman*	157.773.248,00	155.336.860,00	98,46
4.4	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	375.693.586	352.454.210	93,81
4.4. 1	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	207.983.586,00	195.042.850,00	93,78
4.4. 2	Sub Kegiatan : Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi*	77.027.500,00	77.027.500,00	100,00
4.4. 3	Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*	23.775.000,00	23.329.100,00	98,12
4.4. 4	Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00

No	Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.4. 5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*	64.007.500,0 0	54.154.760,00	84,61
5	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	69.274.600	64.952.400	93,76
5.1	Kegiatan : Invensi dan Inovasi	69.274.600	64.952.400	93,76
5.1. 1	Sub Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	18.655.000,0 0	16.850.000,00	90,32
5.1. 2	Sub Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	50.619.600,0 0	48.102.400,00	95,03
Jumlah Total		16.693.818.9 27	15.047.979.164	90,14

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum capaian tujuan, sasaran dan program strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Meskipun terdapat 1 (satu) Sasaran Kinerja yang belum dapat dicapai target kinerjanya yaitu Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah. Dengan indikator kinerja Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 62,5 %, sampai saat ini realisasi kinerjanya baru pada angka 53,13 % atau tingkat capaiannya sebesar 85,01%. Dari 32 Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah ditetapkan, baru 17 Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerjanya atau capain kinerjanya lebih atau sama dengan 100%. Salah satu faktor dari ketidaktercapaian target kinerja yang ditetapkan pada sasaran ini adalah belum dirilisnya sejumlah data indikator capaian tujuan dan sasasaran daerah sampai dengan akhir tahun 2025. Dari total 32 Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah, terdapat 3 Indikator yang belum rilis datanya sehingga data yang dipakai adalah data capaian pada Tahun 2024.

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111, tingkat capaiannya sebesar 212,32 %. Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 18,89 % dapat dicapai sebesar 40,11 %. Dari total inovasi yang ada di Kabupaten Tuban yaitu sejumlah 187 Inovasi, sejumlah 75 Inovasi telah berhasil mencapai tingkat kematangan 81-111.

Sasaran Strategis ketiga yakni Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban di tahun 2025 dapat dicapai pada angka 89,93 dari Target kinerja yang ditetapkan sebesar 89,89. Dengan realisasi kinerja tersebut, Sasaran Strategis ini telah berhasil mencapai tingkat capain kinerjanya sebesar 100,04 %. Pecapaian ini tidak lepas dari upaya peningkatan layanan terutama dalam Perbaikan kualitas pelayanan publik dengan penyusunan Standar Dokumen Pelayanan Publik. Penyusunan

Standar pelayanan Publik dilakukan melalui Forum Konsultasi publik (FKP) yang melibatkan unsur *Pentahelix* sebagai upaya peningkatan kualitas layanan secara kolaboratif. Upaya lain yaitu dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, serta peningkatan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya pencapaian target kinerja dijumpai beberapa kendala atau permasalahan yang merupakan hambatan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah tersebut, antara lain :

1. Beberapa data capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah belum rilis di awal tahun sehingga data yang di gunakan adalah capaian tahun 2024;
2. Pelaksanaan Program /Kegiatan belum berdampak secara signifikan dalam pecapaian tujuan dan sasaran daerah;
3. Belum optimalnya kualitas data dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
4. Masih rendahnya tingkat kematangan inovasi daerah Kabupaten Tuban;
5. Terbatasnya ekosistem inovasi;
6. Belum optimalnya penggunaan hasil riset dan inovasi daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan daerah.

4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut capaian kinerja Tahun 2025 guna peningkatan capaian kinerja di tahun yang akan datang, direkomendasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah guna keselarasan dokumen perencanaan serta pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi melalui penerapan E-Monev dan E-Dalev yang terintegrasi;
3. Optimalisasi Portal Tuban Satu Data;
4. Melakukan identifikasi berkala terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian target kinerja;

5. Mendorong OPD terkait guna peningkatan kinerja guna pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran daerah;
6. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat terkait intervensi kebijakan guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan;
7. Optimalisasi penyelenggaraan lomba inovasi daerah (*Tubernova Award*) kategori Perangkat Daerah dan Masyarakat;
8. Pengembangan ekosistem inovasi daerah;
9. Optimalisasi pendampingan inkubasi inovasi-Tuban Tekno guna peningkatantn tingkat kematangan dan keberlanjutan inovasi;
10. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik personal maupun komunal;
11. Pengembangan dan sosialisasi aplikasi berbasis web Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (SISEVA) untuk memudahkan, melindungi dan menyebarkan hasil-hasil riset dan inovasi agar dapat diterapkan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, akademisi, pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya.

Dengan upaya tindak lanjut yang akan diterapkan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2026. Pencapaian kinerja perangkat daerah merupakan upaya dalam memujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan sekaligus upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tuban, 30 Januari 2026


ABDUL RAKHMAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat 1
 NIP. 19721229 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fuadiyah, SE., M.A.P
NIK : 3523154806730005
NIP : 197306081998032008
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aditya Halindra Faridzky, SE
Jabatan : Bupati Tuban

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia di berikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Pihak Kedua,
Bupati Tuban

Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah

Nurul Fuadiyah, SE., M.A.P

Pembina

NIP. 197306081998032008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TUBAN

Sasaran/Indikator	Target
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sasaran Pembangunan Daerah	
- Persentase capaian sasaran RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	94 %
2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan	
- Persentase Capaian Program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	92,5 %
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
- Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi	10 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.443.430.306	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.506.259.237	APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.772.328.912	APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.008.854.600	APBD
JUMLAH	24.730.873.055	

Pihak Kedua,
Bupati Tuban



Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah



Nurul Fuadiah, SE., M.A.P

Pembina

NIP. 197306081998032008

No	Nama Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Tingkat Capaian	Tahun Data Realisasi	Ket
1	Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni	Indeks Layak Huni	79	79,31	100,39		Tercapai
1,1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	84,85	85,69	100,99		Tercapai
1,2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,85	74,32	99,29		
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	623,55	677,881	108,71		Tercapai
2	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan	PDRB Per Kapita	71,99	71,1	98,76	2024	
		Tingkat Kemiskinan	13,54	14,13	95,82		
2,1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,06	3,86	95,07	2024	
		Rasio Gini	0,334	0,312	107,05		Tercapai
		Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	2,74	2,74	100,00	2024	Tercapai
2,2	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Desa Mandiri	46,95	81,03	172,59		Tercapai
		Indeks Ketahanan Pangan	86,41	73,23	84,75		
2,3	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27	3,44	124,13		Tercapai
		Rasio Kewirausahaan	7,47	8,24	110,31		Tercapai
		Nilai Tukar Petani (NTP)	116,48	119,01	102,17		Tercapai
2,4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	62,5	62,39	99,82		
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	72,56	73,15	100,81		Tercapai
3,1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	8,49	8,29	97,64	2024	
		Harapan Lama Sekolah	12,64	12,77	101,03		Tercapai
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,34	54,94	95,81		
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,75	7,91	90,40		
3,2	Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,1	75,23	100,17		Tercapai
3,3	Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,31	88,81	99,44	2024	
3,4	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100,00		Tercapai

No	Nama Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Tingkat Capaian	Tahun Data Realisasi	Ket
4	Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	93,28	89,69	96,15		
4,1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13	81,27	98,95		
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	100	100	100,00		Tercapai
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	77,99	81,31	104,26		Tercapai
4,2	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,433	0,234	16,33		
		Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	9,83	196,60		Tercapai
4,3	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	4,47	4,14	92,62		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82	89,53	99,68		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)	4,29	4,24	98,83	2024	

ket : Data per 12 feb 2026

Rekapitulasi Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah

Indikator	Formulasi	satuan	target	realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang Mencapai Target / Jumlah Seluruh Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah X 100%	%	62,50	50,00	80,00
	$f(x) = (a/b) \times 100\%$			50,00	
	a = Jumlah Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang Mencapai Target			16,00	
	b = Jumlah Seluruh Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah			32,00	

Kepala Bapperida
Kabupaten Tuban



ABDUL RAKHMAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721229 200212 1 003

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**

NILAI IKM

89,93

**NAMA LAYANAN : 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2. RISET DAN INOVASI**

JUMLAH : 94 Orang
JENIS KELAMIN : L = 39 Orang / P= 55 Orang
PENDIDIKAN : SMA = 14 Orang
D1/D2/D3 = 18 Orang
S1 = 52 Orang
S2 = 9 Orang
S3 = 1 Orang

Periode Survei Januari s.d. Desember Tahun 2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIK
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311
Telp (0356) 321018, Laman www.bapperida.tubankab.go.id,
Pos-el bapperida@tubankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR 100.3.3/10/KPTS/414.201.1/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI, PELAPORAN DAN PUBLIKASI KINERJA LINGKUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026, dan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang-Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 119 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

13. Keputusan Bupati Tuban Nomor
100.3.3.2/104/KPTS/414.012/2025 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat
Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Penetapan Kinerja dan Perubahan Penetapan Kinerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026;
- c. mengkoordinasikan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
- d. mengkoordinasikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
- e. mengkoordinasikan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

- f. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja setiap tribulan untuk Tahun 2026;
- g. membuat laporan publikasi melalui website Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
- h. menyusun laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Kinerja, bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

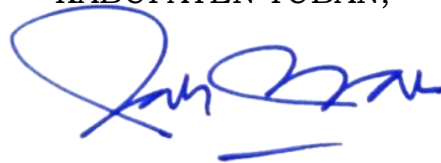
KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



ABDUL RAKHMAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 100.3.3/10/KPTS/414.201.1/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PELAPORAN
DAN PUBLIKASI KINERJA LINGKUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PELAPORAN DAN
PUBLIKASI KINERJA LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN ORGANIK
(1)	(2)	(3)
1. 2. 3.	Pengarah Penanggung jawab Koordinator :	Kepala Bapperida Kabupaten Tuban. Sekretaris Bapperida Kabupaten Tuban. a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kabupaten Tuban. b. Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Bapperida Kabupaten Tuban. c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tuban. d. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Kabupaten Tuban.
4.	Ketua :	Mudik Eka Setia Budi, SH (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban).
5.	Anggota :	a. Rennie Artati, SE (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); b. Hesty Noviana Ekasari, ST, MT (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); c. Nuril Ehwan, SE (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban);

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN ORGANIK
(1)	(2)	(3)
		d. Yesika Wahyu Eka, S.Hut (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); e. Ary Krisnawati, ST (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); f. Diah Septioningrum, ST (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); g. Mohamad Fauji Hamidi, SH.,MAP (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); h. Charolina Gremita P, ST (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); i. Imam Syafi'i, ST (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); j. Ratna Yustina, ST., MT (JF Perekayasa Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); k. Suwoto, SE., MM (JF Perekayasa Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); l. Ratnawati, SH (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bapperida Kabupaten Tuban); m. Erna Yuliestawati, S.AP (Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Tuban); n. Aulia Loren Almadea, A.Md (Pelaksana pada Bapperida Kabupaten Tuban); o. Hernita Rachmawati, A.Md. (Pelaksana pada Bapperida Kabupaten Tuban); p. Ita Parwasari (Pelaksana pada Bapperida Kabupaten Tuban); q. Prawita Wimalaswasti Setyanto, A.Md (Pelaksana pada Bapperida Kabupaten Tuban); r. Indah Ratna Ningtias, S.IP (JF Perencana pada Bapperida Kabupaten Tuban); s. Siti Nurul Hidayah Mu'ah Kotim, SM (JF Perencana pada Bapperida Kabupaten Tuban);

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN ORGANIK
(1)	(2)	(3)
		t. Dyta Denika Novsilvana, SE (JF Perencana pada Bapperida Kabupaten Tuban); u. Sitaresmi Dyah Palupi, S.Si (JF Perencana pada Bapperida Kabupaten Tuban); v. Bobbi Wirawan Putra Perkasa, S.Pn (JF Perencana pada Bapperida Kabupaten Tuban); w. Darwati, S.M (JF Arsiparis pada Bapperida Kabupaten Tuban) x. Juhan Wahyudi (JF Pengadministrasi Perkantoran pada Bapperida Kabupaten Tuban); y. Setyo Rahmat H (JF Pengadministrasi Perkantoran pada Bapperida Kabupaten Tuban); z. Tri Martha Wijaya (Operator Layanan Operasional pada Bapperida Kabupaten Tuban).

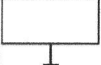
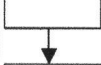
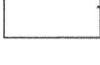
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



ABDUL RAKHMAT

 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Nomor SOP	067/02/414.201.1/2025
	Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	01 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	01 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN  ABDUL RAKHMAT, ST.,MT Pembina Tingkat I NIP. 19721229 200212 1 003
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	NAMA SOP	Pengukuran Kinerja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; e. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; f. Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.	1. Memahami Sistem Perencanaan 2. Memahami Sistem Penatausahaan Keuangan 3. Memahami Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah 4. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan 5. Berorientasi Pelayanan dan Kompeten	
	Peralatan / Perlengkapan	
	1. Laporan Realisasi Keuangan 2. Data dan Informasi Capaian Kinerja 3. Perangkat Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak disusun dengan baik akan menghambat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan dengan optimal	Didokumentasi di Fungsional Perencana yang menangani program dan pelaporan	

Prosedur Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

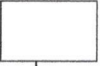
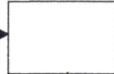
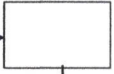
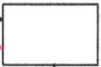
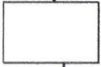
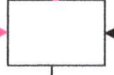
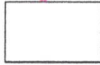
No	Kegiatan	Mutu baku			Mutu Baku		
		Staf	Kepala Badan	Analisis Perencana	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mempersiapkan data dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan				Instruksi	15 menit	Data
2.	Mengukur Realisasi Pencapaian IKU				Instruksi	1 hari	IKU
3.	Review Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala				Disposisi Kaban	15 menit	IKU
4.	Membuat notulen hasil review untuk diajukan ke Kepala Badan				Format penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan triwulan	6 hari	Format penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan triwulan
5.	Mengetahui dan Menandatangani notulen hasil review pengukuran IKU				Daftar koreksi dan masukan dari bidang	1 hari	Format penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan triwulan
6.	Mencetak dan menggandakan notulen hasil review arsip				Data dan Informasi dari Bidang	1 hari	Format penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan triwulan



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

	Nomor SOP	067/01/414.201.01/2025
	Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	01 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	01 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN  ABDUL RAHKMAT, ST.,MT Pembina Tingkat I NIP. 19721229 200212 1 003
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	NAMA SOP	Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; e. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; f. Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.	1. Memahami Sistem Perencanaan 2. Memahami Sistem Penatuausahaan Keuangan 3. Memahami Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah 4. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan 5. Berorientasi Pelayanan dan Kompeten	
	Peralatan / Perlengkapan	
	1. Laporan Realisasi Keuangan 2. Data dan Informasi Capaian Kinerja 3. Data dan Informasi asset 4. Perangkat Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak disusun dengan baik akan menghambat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan dengan optimal	Didokumentasi di Fungsional Perencana yang menangani program dan pelaporan	

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kepala	Sekretaris	JF Perencana	JF Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Sekretaris untuk Menyusun Laporan Kinerja					Instruksi	10 menit	Disposisi Kaban	
2.	Sekretaris yang kompeten memfasilitasi rapat dengan Kepala Bidang dan Fungsional dalam menyusun Laporan Kinerja					Instruksi	10 menit	Disposisi Kaban	Data dari Bidang Teknis
3.	Menugaskan Fungsional Perencana untuk memfasilitasi pengumpulan data semua pejabat eselon dan menyusun konsep Laporan Kinerja					Disposisi Kaban	10 menit	Disposisi Sekretaris	Data dari Bidang Teknis
4.	Mengumpulkan data dari semua eselon, memverifikasi, mengolah, mengonsep dan menugaskan staf untuk mengetik konsep Laporan Kinerja					Data, Renstra, DPA	12 jam	Konsep Laporan Kinerja	Apabila terdapat kesalahan data akan di lakukan perbaikan
5.	Mengetik konsep dan menyerahkan konsep Laporan Kinerja					Konsep Laporan Kinerja	3 jam	Draft Laporan Kinerja	
6.	Mengoreksi draft Laporan Kinerja dan Menyerahkan kepada Sekretaris					Draft Laporan Kinerja	60 menit	Draft Hasil Koreksi	Apabila terdapat kesalahan data akan di kembalikan ke JF Pelaksana untuk dilakukan perbaikan
7.	Mengoreksi draft Laporan Kinerja dan Menyerahkan kepada Kepala Badan					Draft Hasil Koreksi	15 menit	Draft Hasil Koreksi	Apabila terdapat kesalahan data akan di kembalikan ke JF Perencana
8.	Menandatangani Laporan Kinerja					Draft Hasil Koreksi	10 menit	Laporan Kinerja	Laporan Kinerja diarsipkan dan dikirim ke Instansi terkait, apabila terdapat kesalahan data akan di kembalikan ke Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311
Telp (0356) 321018, Laman www.bapperida.tubankab.go.id,
Pos-el bapperida@tubankab.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 26 Januari 2026
Waktu : 13.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Pangeran Anom
Acara : Rapat Pembahasan Penyusunan LKjIP Tahun 2025

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

Guna pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis . Indikator kinerja utama beserta target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 yaitu :

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang Mencapai Target / Jumlah Seluruh Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah X 100%	62,50%
2	Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	Jumlah Inovasi dengan Nilai Kematangan 81- 111 / Jumlah Seluruh Inovasi X 100%	18,89%

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2025
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,89

b. Tujuan pengukuran capaian kinerja organisasi, antara lain :

- 1) Menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 2) Peningkatan akuntabilitas;
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja organisasi;
- 4) Sebagai bahan pengambilan kebijakan manajerial organisasi;
- 5) Mendorong efektifitas dan efisiensi organisasi;
- 6) Mendorong peningkatan motivasi dan capaian kinerja pegawai.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis 2025-2019 dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemajuan dan tingkat ketercapaian target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan. Perbandingan ini juga dapat dibuat acuan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, atau menyesuaikan target kinerja jangka menengah melalui Perubahan Rencana Strategis.

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	50,00	78,13	64,00%
2	Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai	40,11	28,89	138,84%

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
		Kematangan 81-111			
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,93	92,39	97,34%

- d. Realisasi anggaran yang dicapai Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban di tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 15.047.979.164,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 90,14 %.
- e. Dalam upaya pencapaian target kinerja dijumpai beberapa kendala atau permasalahan yang merupakan hambatan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah tersebut, antara lain :
1. Beberapa data capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah belum rilis di awal tahun sehingga data yang di gunakan adalah capaian tahun 2024;
 2. Pelaksanaan Program /Kegiatan belum berdampak secara signifikan dalam pecapaian tujuan dan sasaran daerah;
 3. Belum optimalnya kualitas data dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
 4. Masih rendahnya tingkat kematangan inovasi daerah Kabupaten Tuban;
 5. Terbatasnya ekosistem inovasi;
 6. Belum optimalnya penggunaan hasil riset dan inovasi daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan daerah

f. Rekomendasi Tindak Lanjut :

1. Memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah guna keselarasan dokumen perencanaan serta pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi melalui penerapan E-Monev dan E-Dalev yang terintegrasi;
3. Optimalisasi Portal Tuban Satu Data;
4. Melakukan identifikasi berkala terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian target kinerja;
5. Mendorong OPD terkait guna peningkatan kinerja guna pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran daerah;
6. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat terkait intervensi kebijakan guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan;
7. Optimalisasi penyelenggaraan lomba inovasi daerah (Tubernova Award) kategori Perangkat Daerah dan Masyarakat;
8. Pengembangan ekosistem inovasi daerah;
9. Optimalisasi pendampingan inkubasi inovasi-Tuban Tekno guna peningkatantn tingkat kematangan dan keberlanjutan inovasi;
10. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik personal maupun komunal;
11. Pengembangan dan sosialisasi aplikasi berbasis web Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (SISEVA) untuk mewadahi, melindungi dan menyebarkan hasil-hasil riset dan inovasi agar dapat diterapkan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, akademisi, pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya.

Disusun Oleh,
JF Perencana Ahli Muda



MWDIK EKA SETIA BUDI, SH
NIP. 19850406 200501 1 002

DOKUMENTASI RAPAT
PEMBAHASAN PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2025
SENIN, 26 JANUARI 2026





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311
Telp (0356) 321018, Laman www.bapperida.tubankab.go.id,
Pos-el bapperida@tubankab.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024
Nomor : 100.1.7/292/414.201.1/2026

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Pangeran Anom Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
I	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	25,93 poin	25,70 poin	99,11%
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	62,50%	50%	80%
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,89 angka	89,93 angka	100,04%
II	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	57 angka	69,41 angka	121,77%

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	dan Inovasi Daerah				
	Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81-111	18,89%	40,11%	212,32%

Mengetahui
Kepala Badan Perencanaan
dan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



ABDUL RAHMAT, ST.,MT
NIP. 197211229 200212 1 003